

**ANALISIS KINERJA BPD SETELAH PEMEKARAN KABUPATEN
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Studi Kasus: Desa Seri Dalam Kecamatan Tanjung Raja

Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

SKRIPSI

Untuk memenuhi Persyaratan Dalam

Mencapai Derajat SI Ilmu Sosiologi



Disusun Oleh

DINUL SAKTI GULTOM

07061002051

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013

R 21967
21931

S
352.1407
Din
a
C/1 → 132210
2013

**ANALISIS KINERJA BPD SETELAH PEMEKARAN KABUPATEN
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**Studi Kasus: Desa Seri Dalam Kecamatan Tanjung Raja
Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi Persyaratan Dalam
Mencapai Derajat SI Ilmu Sosiologi**



Disusun Oleh

DINUL SAKTI GULTOM
07061002051

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2013

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KINERJA BPD SETELAH PEMEKARAN KABUPATEN TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SERIDALAM
KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk mengikuti
Ujian komprehensif dalam memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1 Sosiologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh

DINUL SAKTI GULTOM
07061002051

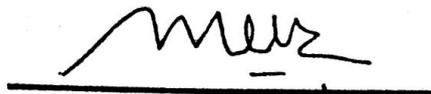
Dosen Pembimbing I

Dr. Ridhah Taqwa
NIP 196612311993031018



Dosen Pembimbing II

Merry Yanti, S. Sos. MA
NIP 197705042000122001



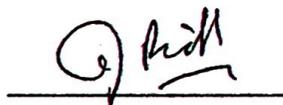
**ANALISIS KINERJA BPD SETELAH PEMEKARAN KABUPATEN
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
Studi Kasus : Desa Seridalam Kecamatan Tanjung Raja
Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

SKRIPSI

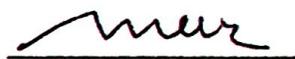
Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
Dan Dinyatakan Berhasil Untuk memenuhi Sebagian Syarat
Dari Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Dr. M. Ridhah Taqwa
Ketua



Merry Yanti, S.Sos.MA
Anggota



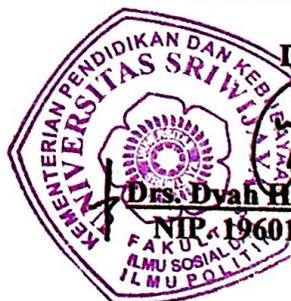
Drs. Sulaiman Mansyur, Lc, M.Hum
Anggota



Rudi Kurniawan, M.Si
Anggota

Inderalaya, Juli 2013
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dekan,

Drs. Dyah Hapsari ENH, M.Si
NIP. 196010021992032001


MOTTO :

Hati adalah raja dan tubuh adalah pengikutnya, jika rajanya baik maka baik pula pengikutnya.

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.”(QS. Al-Israa : 37)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Kinerja BPD Setelah Pemekaran Kabupaten Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Seridalam Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan serta sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Dyah Hapsari ENH, Msi sebagai Dekan FISIP Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA selaku Ketua Jurusan Sosiologi
3. Bapak Dr. Ridhah Taqwa sebagai pembimbing I
4. Ibu Mery Yanti, S.Sos, MA sebagai pembimbing II
5. Kepada semua Dosen FISIP Unsri, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Sosiologi yang telah memberikan ilmu kepada penulis
6. Seluruh staf karyawan FISIP Unsri
7. Ayahanda (Alm) dan ibunda tercinta yang telah memberikan semangat dan nasehat selama ini.
8. Saudara-saudaraku tercinta Marta Dinata Hasudungan Gultom dan Elsa Siahaan yang selalu memberi inspirasi.
9. Kepada seluruh responden yang selalu memberikan informasi kepada penulis yaitu Bapak Kades Bapak Suharto, Bapak Ketua BPD Kamaludin dan pihak-pihak yang terkait yang membantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2006 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik positif yang membangun sangat penulis harapkan dalam perbaikan. Penulis juga berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Seridalam, 2013

Penulis

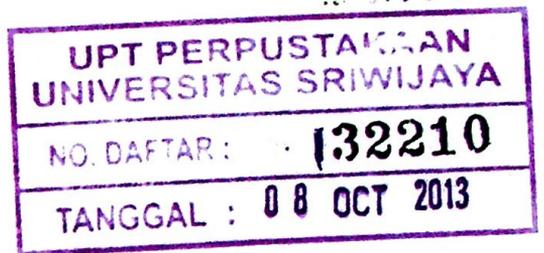
ABSTRAK

Desentralisasi dan otonomi daerah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan telah diperbaharui oleh UU No. 32 tahun 2004. Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten yang mengalami pemekaran dari kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa Seri Dalam merupakan salah satu dari 241 desa yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Tanjung Raja dengan luas wilayah 3,00 Km². Sebagian besar penduduk Desa Seri Dalam bermata pencaharian sebagai petani, karena desa ini termasuk daerah yang agraris.

BPD dibentuk untuk membantu kepala desa meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ada di Desa. Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan pada dampak pemekaran Kabupaten Ogan Ilir terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Palembang dalam mensejahterakan masyarakat Desa Seri Dalam.

Tujuannya untuk mengetahui dampak dan usaha kerjasama yang dilakukan Perangkat Desa, BPD dan masyarakat Desa Seri Dalam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teori kontrak sosial Jhon Locke. Para informan diambil secara acak, mulai dari ketua dan wakil BPD, Kepala Desa dan tokoh masyarakat di Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Palembang.

Hasil penelitian memperlihatkan BPD Desa Seri Dalam sejak awal didirikan terus bekerjasama dengan Kepala Desa Seri Dalam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Seri Dalam. Fungsi BPD adalah sebagai pengawas kinerja aparat desa, pengayom masyarakat desa dan motivator agar program kerja aparat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terlaksana dengan baik. Sebagai pengawas kinerja aparat desa, BPD Desa Seri Dalam berhasil membantu kepala desa dalam menyalurkan RASKIN pada masyarakat desa yang benar-benar layak menerimanya. Sebagai pengayom masyarakat Desa, BPD Desa Seri Dalam telah memberikan izin pada masyarakat Desa Seri Dalam untuk melakukan penambangan pasir. Selain itu, beberapa rumah tidak layak huni juga mulai diperbaiki dan kebutuhan RASKIN lebih diutamakan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebagai motivator dan mitra kerja aparat desa, BPD Desa Seri Dalam telah mengizinkan kepala desa mengadakan kerjasama dengan desa lain dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Seri Dalam. Sampai saat ini kesejahteraan masyarakat Desa Seri Dalam terus mengalami peningkatan, terutama dibidang pendidikan dan perekonomian. Masyarakat Desa Seri Dalam merupakan alat kontrol bagi kinerja BPD agar tidak menyimpang terlalu banyak dari tugas dan fungsinya sebagai pemerintah Desa.



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Bagan.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	9
1.6. Kerangka Pemikiran.....	13
1.7. Metodologi Penelitian.....	17

BAB II GAMBARAN UMUM DESA SERI DALAM KECAMATAN TANJUNG

RAJA, KABUPATEN OGAN ILIR

2.1. Letak Geografis Desa Seri Dalam, Kec. Tanjung Raja.....	26
2.2. Keadaan Penduduk Dan Mata Pencaharian.....	27
2.3. Kondisi Pendidikan Dan Kesehatan.....	29
2.4. Pemerintahan.....	30

BAB III BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SERI DALAM KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR

3.1. Sejarah Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa.....	33
3.2. Sejarah Perkembangan BPD Desa Seri Dalam.....	36

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

4.1. Peranan BPD Desa Seri Dalam setelah Otonomi Daerah.....	41
4.2. Masyarakat sebagai Kontrol terhadap Kinerja BPD Desa Seri Dalam.....	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran-Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Umur Penduduk Desa Seri Dalam Tahun 2012-2013.....	28
Tabel 2.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Seri Dalam Tahun 2012-2013.....	29
Tabel 2.3 Pendidikan Penduduk Desa Seri Dalam Tahun 2012-2013.....	30
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Seri Dalam.....	30
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Seri Dalam.....	31
Tabel 2.6 Nama-nama Perangkat Desa Seri Dalam.....	33
Tabel 2.7 Nama-nama Pengurus Lembaga Adat Desa Seri Dalam.....	33
Tabel 3.1 Nama-nama Anggota BPD Desa Seri Dalam Tahun 2007/2013.....	38

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran.....	17
Bagan 2.1 Stuktur Pemerintahan Desa Seri Dalam.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada zaman pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Pemerintah Pusat negara kesatuan Republik Indonesia sangat sentralistik dan semua daerah di republik ini menjadi perpanjangan tangan kekuasaan Jakarta (pemerintah pusat). Artinya, rezim Orde Baru mewujudkan kekuasaan sentralisasi dengan banyak memberikan keuntungan pada wilayah pusat, tanpa melihat kehidupan masyarakat yang ada di daerah. Daerah yang kaya akan sumber daya alam, ditarik keuntungan produksinya dan dibagi-bagi di antara elite Jakarta dengan alasan sebagai alat investasi untuk pembangunan daerah. Akibatnya, pembangunan antara di daerah dengan di Jakarta menjadi tidak seimbang. B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai presiden pasca-Orde Baru membuat kebijakan politik baru yang mengubah hubungan kekuasaan pusat dan daerah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah atau yang biasa disebut desentralisasi (Michael Malley, 2001: 122-181). Undang-undang ini dikeluarkan pemerintah dengan harapan, daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Jakarta dan tidak lagi diatur oleh pusat. Bahkan, beberapa daerah, seperti Aceh, Riau dan Papua menuntut merdeka dan ingin berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Budi Agustono, 2005: 163).

Pada masa awal reformasi, selain adanya keinginan provinsi memisahkan dari republik, juga bermunculan aspirasi dari berbagai daerah yang menginginkan dilakukannya pemekaran provinsi dan kabupaten. Upaya pembentukan provinsi

dan kabupaten baru ini, tarik-menarik antara kelompok yang setuju dan tidak setuju terhadap pemekaran daerah sebagai akibat dari otonomi daerah. Sehingga situasi yang terjadi mampu meningkatkan suhu politik lokal. Indikasi ini tercermin dari munculnya ancaman dari masing-masing kelompok yang pro dan kontra terhadap terbentuknya daerah baru, mobilisasi massa dengan sentimen kesukuan, bahkan sampai ancaman pembunuhan. Berangsur-angsur, pemekaran wilayah pun direalisasikan dengan pengesahannya oleh Presiden Republik Indonesia melalui undang-undang.

Desentralisasi dan otonomi daerah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan telah diperbaharui oleh UU No. 32 tahun 2004, yang merupakan payung hukum bagi daerah otonom. Desentralisasi dalam wujudnya sebagai otonomi daerah, memberikan sebagian kewenangan pengelolaan urusan publik untuk dilimpahkan pada provinsi dan kabupaten, termasuk pemekaran wilayah dalam usaha mempercepat pembangunan dan perkembangan wilayah. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dwiyanto ed, 2005: 45).

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub-sistem pemerintah negara untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat (UU No.32, 2004). Adanya aspirasi masyarakat yang memiliki visi terhadap kemajuan

dan kemakmuran masyarakat, memberikan alasan tepat bagi putra daerah Ogan Ilir meminta persetujuan pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran wilayah di Kabupaten Ogan Ilir.

Kabupaten Ogan Ilir merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 37 tahun 2003 dan diresmikan pada tanggal 07 Januari 2004. Kabupaten Ogan Ilir mengemban tugas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercapai suatu pelayanan prima dalam rangka otonomi daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab. Tujuan pembentukan Kabupaten Ogan Ilir antara lain:

- a) Meningkatkan efektifitas pendayagunaan sumber daya.
- b) Memperpendek rentang kendali pemerintahan.
- c) Mempercepat penyebaran dan hasil pemerataan hasil-hasil pembangunan, sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Keadaan wilayah Kabupaten Ogan Ilir yaitu bagian utara merupakan hamparan dataran rendah dan berawa yang sangat luas mulai dari Kecamatan Pemulutan sampai dengan Indralaya, sedangkan Kecamatan Tanjung Batu dan Kecamatan Muara Kuang relatif tinggi dengan ketinggian 10 meter di atas permukaan air laut. Dengan demikian keadaan wilayah Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari daratan mencapai 65% dan daerah rawa 35%. Kondisi daerah rawa tersebut umumnya merupakan rawa lebak yang tersebar di beberapa Kecamatan, Sedangkan di Kecamatan Tanjung Batu daerah rawanya tidak begitu luas.

Kabupaten Ogan Ilir (OI) memang tergolong kabupaten yang berumur muda, tapi mampu mencapai kemajuan yang cukup pesat karena terletak pada lokasi yang strategis. Kabupaten OI hanya berjarak sekitar 30 km dari Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan (SUMSEL). Selain itu, wilayahnya berada di jalur lintas timur Sumatera yang beraspal mulus dan ramai dengan kendaraan antar kota-antar provinsi maupun antar kabupaten di Sumsel. Sebagian kantor dan dinas tingkat provinsi, termasuk kampus Universitas Sriwijaya juga berada di sini. Kabupaten OI sering juga disebut sebagai “Palembang kecil”, sebab dinilai telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan memadai. Kabupaten OI memiliki luas wilayah 2.666,07 km², secara geografis terletak diantara 30 02' sampai 30 48' Lintang Selatan dan diantara 1040 20' sampai 1040 48' Bujur Timur. Pada awal berdirinya Kabupaten Ogan Ilir baru memiliki 6 kecamatan, 164 desa/kelurahan terdiri dari 159 desa dan 5 kelurahan. Jumlah kecamatan saat ini sebanyak 16 kecamatan, terdiri dari 227 desa dan 14 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rambang Kuang dengan luas wilayah 528,82 km² sedangkan kecamatan tersempit adalah Kecamatan Rantau Panjang dengan luas wilayah 40,85 km².

Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten OI sangat mencukupi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, diantaranya: sektor pertanian, perkebunan, teknik industri dan kerajinan tangan. Sekitar 70% penduduk usia 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian yang berbasis tanaman pangan dan kebun. Hal yang paling menarik dari sektor pertanian di Kabupaten OI, jika daerah lain banyak bergantung kepada warga pendatang dalam bercocok tanam sawah, di Kabupaten OI justru dijalankan oleh penduduk asli yang

kebanyakan keturunan suku Ogan, Pegagan, dan Penesak. Terdapat sejumlah usaha di Ogan Ilir, seperti asam sulfat, gas acetylene, pakan ternak, plastik, kodok beku, perbengkelan, dan moulding. Nilai investasi dari 15 industri mencapai sekitar Rp 76 miliar. Hanya saja, kabupaten ini belum punya kawasan peruntukan industri serta perdagangan karena faktor rawa lebak di atas.

Faktor pendukung perekonomian di Kabupaten OI lainnya adalah industri kecil dan kerajinan yang dijalankan secara serius oleh masyarakat yang sebagian besar kegiatannya berada di Kecamatan Tanjung Batu. Untuk pangan, misalnya, terdapat usaha kerupuk (ikan), ikan asin, ikan asap (salai), chip nanas, serta penggilingan kopi bubuk. Terdapat juga usaha di bidang logam, seperti pandai besi, emas, perak, dan aluminium. Ada pula kerajinan kain songket, kain tajung, dan kayu ukir. Dari sekian usaha, yang cukup menonjol adalah usaha rumah kayu (panggung) bongkar pasang.

Desa sebagai garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis dari masyarakat desa. Pemerintahan desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan di desa, sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Pemerintahan desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan merupakan satuan pemerintahan terendah yang berada langsung dibawah kecamatan, dalam penyelenggaraan pemerintahannya merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan serta memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, untuk

itu pemerintah menganggap perlu untuk memperkuat kehidupan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan menyelenggarakan administrasi desa yang makin berdayaguna dan berhasilguna dalam menunjang pembangunan.

Pembangunan desa adalah pembangunan yang berdasarkan pendekatan dan pengorganisasian masyarakat yang berorientasi kepada perkembangan kemajuan bersama. Aparat pemerintah yang ada di desa harus mampu memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas yang dimiliki. Seperti: menggali potensi desa yang terdiri atas sumber daya manusia, potensi alam dan teknologi, serta aspek-aspek kehidupan lainnya yang mencakup pembangunan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan. BPD merupakan salah satu lembaga pemerintah yang diciptakan untuk membantu mewujudkan dan melayani kebutuhan masyarakat yang ada di desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga desa yang dibentuk di tiap-tiap desa diseluruh Indonesia yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD dengan pemerintah desa. Di level desa perlu dibangun good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang

memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa yang direpresentasikan melalui kelembagaan BPD dalam setiap urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan kepentingan desa. Tentunya ini dapat terwujud apabila BPD memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat tidak hanya terhadap pemerintah desa tetapi juga terhadap pemerintah supra desa.

Desa Seri Dalam merupakan salah satu dari 241 desa yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan salah satu dari 19 Desa di wilayah Kecamatan Tanjung Raja yang terletak sebelah Timur dari desa Tanjung Temiang, luas wilayah Desa Seri Dalam adalah 3,00 Km². Sebagian besar penduduk Desa Seri Dalam bermata pencaharian sebagai petani, karena desa ini termasuk daerah yang agraris. Pertanian yang ada sebagian besar adalah karet. Desa Seri Dalam dikepalai oleh Suharto sebagai kepala desa yang bertanggung jawab atas penduduk 3 dusun yang masing-masing dikepalai oleh kepala dusun dengan jumlah penduduk 1.752 jiwa. Seperti Desa pada umumnya, Desa Seri Dalam juga memiliki BPD yang berfungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan di Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung raja, Kabupaten Ogan Ilir, Palembang. Pada penelitian ini, akan dikaji lebih dalam tentang indikator dan tugas pokok anggota BPD Desa Seri Dalam sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian di atas perlu diketahui perkembangan Kabupaten Ogan Ilir sebagai wilayah hasil pemekaran Ogan Komering Ilir, sebelum dan setelah pemekaran wilayah dilaksanakan. Bagi penulis akan sangat menarik dan penting sekali untuk mengetahui bagaimana dampak pemekaran Kabupaten Ogan Ilir terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seri Dalam,

Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Palembang dalam mensejahterakan masyarakat Desa Seri Dalam? Untuk mempermudah penelitian, maka rumusan masalah dipecah dalam tiga pokok masalah, yaitu:

1. Apakah pemekaran Kabupaten Ogan Ilir berdampak positif bagi kinerja BPD di Desa Seri Dalam terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa?
2. Bagaimana usaha masyarakat Desa Seri Dalam untuk mengontrol kinerja BPD di desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum:

Memahami dampak pemekaran Kabupaten Ogan Ilir terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Palembang dalam mensejahterakan masyarakat Desa Seri Dalam.

1.3.2. Tujuan Khusus:

1. Memahami dampak positif pemekaran Kabupaten Ogan Ilir bagi kinerja BPD di Desa Seri Dalam terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Seri Dalam.
2. Memahami usaha yang dilakukan masyarakat Desa Seri Dalam untuk mengontrol kinerja BPD di Desa Seri Dalam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh kalangan akademisi serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pemikiran bagi pihak akademisi yang tertarik pada penelitian tentang masyarakat dan kinerja pemerintahan. Peneliti berharap ada yang akan melanjutkan penelitian ini untuk lebih mengembangkan penelitian tentang hubungan kesejahteraan masyarakat dengan kinerja pemerintahan. Metode dan pendekatan penelitian sosiologi sangat membantu peneliti yang senang meneliti tentang individu, masyarakat dan semua kegiatannya. Karena, meneliti sebuah masyarakat tidak terlepas dari peran serta ilmu sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang berdiri sendiri dan memiliki peranan penting untuk membantu akademisi dalam melaksanakan dan menganalisis hasil penelitian tentang kehidupan sosial masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Desa Seri Dalam untuk lebih mengontrol kinerja BPD agar selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat Desa Seri Dalam. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk lebih cepat dan mudah dalam memahami dan menanggapi setiap suara aspirasi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang dampak pemekaran Kabupaten sudah pernah diteliti sebelumnya. Ade Ahmad Faruk Syahputra meneliti tentang *Dampak Pemekaran*

Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Ade menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan memilih 100 warga di 3 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada sebagai sample penelitian yakni Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Dolok Masihul, dan Kecamatan Bandar Khalifah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah pemekaran wilayah di Kabupaten Serdang Bedagai yang dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia. Dimana pada tahun 2007, IPM kabupaten Serdang Bedagai berkisar antara 71,9 , tahun 2008 berkisar 72,59 dan pada tahun 2009 menjadi 72,9.

Asfianih meneliti tentang *Proses Pemekaran Kabupaten Tana Tidung* di Propinsi Kalimantan Timur. Nama Ibukota Kabupaten ini memang unik dengan ejaannya yang khas Tideng Pale (baca: *Tidung Pala*). Nama Tideng Pale berasal dari dua kosa kata yakni "Tideng" dan "Pale". Dalam Bahasa Tidung "Tideng" artinya Gunung sementara "Pale" berarti "Tawar/Hambar", jika disatukan maka bermakna "Gunung Hambar". Gunung Hambar yang berarti gunung yang dibawahnya mengalir air sungai yang berasa tawar dan asin. Pada tanggal 28 November 2002 tokoh-tokoh adat Kabupaten Tana Tidung melakukan deklarasi sekaligus pembentukan presidium untuk memperjuangkan Kabupaten Tana Tidung di Kayan Restoran Hotel Tarakan Plaza. Presidium Kabupaten Tana Tidung, melakukan upaya keras untuk menyosialisasikan dan menyakinkan rencana pembentukan Kabupaten Tana Tidung ini kepada DPRD Nunukan dan Bulungan saat itu. Awalnya usaha presidium selalu dipandang sebelah mata oleh para anggota DPRD Nunukan dan Bulungan, sampai akhirnya diresmikan sebagai

Kabupaten Baru pada tanggal 17 Juli 2007 dengan diiringi pelantikan Ir. Zaini Anwar, MM sebagai Bupati Kabupaten Tana Tidung.

M. Ade Doni, meneliti Evaluasi Proses Pemekaran Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Identifikasi Data Kelengkapan Antara Prosedur Dan Relita). Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi proses pemekaran wilayah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan membandingkan antara data yang sesuai prosedur dan realita di lapangan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan inkuiri naturalistik terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Kubu Raya dan masyarakat di wilayah Kabupaten Pontianak (Kab.Induk) sebagai unit analisis dengan metode observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, dalam proses pembentukan Kabupaten Kubu Raya terdapat perbedaan data-data yang didapat dengan data yang tertuang didalam data acuan pembentukan dan pembentukan Kabupaten Kubu Raya. Didalam proses pemekaran wilayah, dan faktor yang mendasari terbentuknya Kabupaten Kubu Raya didasarkan atas aspirasi atau tuntutan dari masyarakat untuk menjadi daerah otonomi yang sangat kuat.

Henderiyana sudah selesai meneliti *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Pemekaran (Terbentuknya) Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau*. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2008. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang: Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas melalui perjuangan yang lumayan panjang dan sempat tertunda

pembahasannya, karena persyaratan administrasi yang belum lengkap. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang diperoleh tidak dianalisis secara statistik tetapi data-data yang terkumpul disusun dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan ada dua faktor besar yang berpengaruh dalam proses terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas. *Pertama*, faktor syarat administrative, teknis dan fisik yang mencaup (1) Faktor Sosial Politik dan Sosial Budaya. (2) Faktor Hukum dan Pemerintahan. (3) Faktor Luas Rentang Kendali. (4) Faktor Potensi Daerah. (5) Faktor Syarat Administratif. (6) Pertahanan dan Keamanan. *Kedua*, dinamika Politik yang mencakup (1) Aspek Historis. (2) Aspek Politis (tarik ulur kepentingan politik). Faktor luas rentang kendali merupakan alasan utama dibentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas. Karena faktor inilah yang menjadi akar masalah gagalnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang pernah dijanjikan oleh Bupati Natuna.

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis terinspirasi, setelah banyak membaca tentang proses dan dampak pemekaran wilayah di beberapa Kabupaten termasuk sejarah pemekaran Kabupaten Ogan Ilir. Khusus di wilayah Palembang, penulis belum menukan hasil penelitian yang mengangkat tentang dampak pemekaran Kabupaten Ogan Ilir, Palembang terhadap kinerja BPD di Desa Seri Dalam. Kinerja BPD dinilai penulis akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Seri Dalam secara khusus dan menjadi tolak-ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir secara umum sebagai Kabupaten yang baru diresmikan Pemerintah Pusat.

1.6. Kerangka Pemikiran

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Istilah masyarakat terlalu banyak dan mencakup berbagai faktor sehingga walaupun diberikan definisi yang mencakup keseluruhannya, masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsurnya (Soekanto, 1990:26).

Beberapa definisi masyarakat menurut beberapa para ahli (Soekanto, 1990:26):

1. Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat itu sendiri selalu berubah (Mac Iver dan Page).
2. Selo Soemartjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, menghasilkan kebudayaan.

Suatu masyarakat mempunyai lokasi atau tempat tinggal wilayah tertentu. Walaupun ada sekelompok manusia merupakan masyarakat pengembara akan tetapi ada pada saat tertentu anggotanya pasti berkumpul pada suatu tempat tertentu, misalnya dalam mengadakan upacara adat tradisional. Selain tempat tinggal, dalam masyarakat harus ada perasaan diantara anggota bahwa mereka saling memerlukan dalam membutuhkan (Soekanto, 1990:26). Masyarakat dan pembangunan merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Usaha

pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan yang merata disetiap wilayah diterapkan dalam program otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: "Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pada sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Konsekuensi dari pemberlakuan sistem otonomi daerah adalah dengan dibentuk pula perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu Undang-

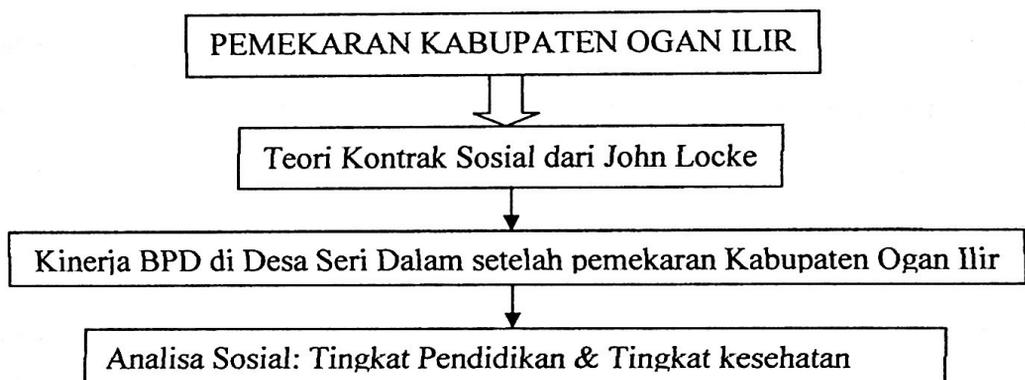
Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Nomor 25 Tahun 1999) yang kemudian diganti dengan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004). Selain itu, amanat UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” realisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP Nomor 6 Tahun 2005).

Pemberlakuan otonomi daerah di negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata membawa dampak pemekaran di propinsi dan kabupaten se-Indonesia. Kabupaten Ogan ilir yang terletak di propinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu bentuk pemekaran wilayah yang memisahkan diri dari wilayah induk yaitu kabupaten Ogan Komerin Ilir (OKI). Ketertarikan peneliti pada objek kajian ini terletak pada hasil yang melibatkan masyarakat kabupaten Ogan Ilir. Penelitian yang dilakukan oleh LIPI sebelum ini, menunjukkan bahwa wilayah baru hasil pemekaran (sebagai dampak otonomi daerah) banyak yang mengalami kesulitan untuk berkembang dibidang sosial, ekonomi dan layanan publik. Padahal, seharusnya wilayah hasil pemekaran harus memperlihatkan kemajuan disemua bidang melebihi wilayah induk dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

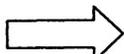
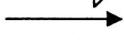
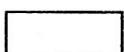
Penelitian ini menggunakan teori kontrak sosial dari John Locke (1632-1704) tentang hubungan antara masyarakat dengan lembaga pemerintahan. Manusia pada dasarnya mempunyai hak-hak asasi yang berupa hak untuk hidup,

kebebasan dan hak atas harta benda. Kontrak antara warga masyarakat dengan pihak yang mempunyai wewenang sifatnya atas dasar faktor pamrih. Bila pihak yang mempunyai wewenang tadi gagal untuk memenuhi syarat-syarat kontrak, maka warga-warga masyarakat berhak untuk memilih pihak lain.

Bagan Kerangka Pemikiran



Keterangan:

-  : Menunjukkan hubungan
-  : Menunjukkan proses
-  : Menunjukkan bentuk

Teori kontrak sosial dari John Locke, dinilai peneliti dapat dipergunakan untuk mengetahui sejarah awal dan proses terjadinya pemekaran Kabupaten Ogan Ilir, Palembang. Selain itu, peneliti juga yakin teori kontrak sosial akan banyak membantu peneliti menemukan dampak positif pemekaran Kabupaten Ogan Ilir, Palembang terhadap Kinerja BPD di Desa Seri Dalam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peneliti melihat dilapangan banyak terjadi kontrak sosial diantara antara masyarakat dengan pegawai pemerintah Kabupaten sebelum dilantik sebagai pengayom masyarakat (terjadinya PEMILU KADA).

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan (Ridwan, 2004: 49). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimulai dari gagasan ide penelitian, pengumpulan data, menjawab penelitian, melakukan kategorisasi, sampai dengan membangun konsep dan proposisi-proposisi (Bungin, 2001).

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang akan bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena di mana yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto. 1997: 254). Penelitian deskriptif juga bermaksud membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Usman dan Akbar, 1995: 4).

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Ogan Ilir dan Desa Seri Dalam. Alasan mengapa memilih lokasi ini, karena Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu Kabupaten baru hasil pemekaran sebagai dampak terbitnya peraturan otonomi daerah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan program otonomi daerah yang dilaksanakan pemerintah pusat adalah memberikan kesempatan pada daerah-daerah yang tertinggal dalam pembangunan

agar mempercepat pembangunan di daerah masing-masing. Keinginan untuk memisahkan diri dari wilayah induk, bukan tanpa alasan yang kuat. Semua wilayah baru meminta persetujuan pusat untuk memisahkan diri, karena menilai memiliki potensi SDA dan SDM yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang perubahan sosial, ekonomi dan politik masyarakat yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat Desa Seri Dalam, Kabupaten Ogan Ilir, Palembang.

1.7.3. Definisi Konsep

- a. Pemekaran Kabupaten adalah perluasan wilayah pemerintahan yang diatur oleh UU sebagai akibat adanya program otonomi daerah.
- b. Kesejahteraan adalah suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat {Friedlander dalam Dwi Heru Sukoco (1991)}.
- c. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Dalam masyarakat pedesaan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga itu dipengaruhi oleh sistem hukum adat setempat dan sistem kemasyarakatan serta bentuk perkawinan. Masyarakat adalah sejumlah orang-orang yang hidup bersama-sama, yang menghasilkan kebudayaan (Soekanto, 1998:22). Masyarakat adalah

kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut (Horton dan Hunt, 1991).

1.7.4. Unit Analisis Data

Unit Penelitian (unit analisis atau unit elemeter) adalah unit yang akan diteliti dan dianalisis (Singarimbun dan Efendi, 1995:155). Berdasarkan pengertian tersebut, maka unit analisis dapat diartikan sebagai objek nyata yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Aparat BPD Desa Seri Dalam dan masyarakat Desa Seri Dalam, Kabupaten Ogan Ilir, Palembang.

1.7.5. Penentuan Informan

Penentuan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2006:132). Penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu teknik yang bertujuan mengambil informasi dari orang-orang yang benar-benar terlibat dengan permasalahan yang diteliti, yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu dan ditetapkan secara sengaja. Informan dalam penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Aparat BPD Desa Seri Dalam dan anggota masyarakat Desa Seri Dalam, tapi tidak semua dapat dijadikan informan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti memberikan batasan kriteria untuk menentukan informan dalam penelitian ini. Setelah melakukan penelitian awal di kabupaten Ogan Ilir, peneliti memutuskan memilih beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:



1. Mengetahui sejarah dan proses pemekaran Kabupaten Ogan Ilir, Palembang.
2. Mengetahui dampak pemekaran Kabupaten Ogan Ilir terhadap kinerja aparat BPD Desa Seri Dalam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
3. Pernah menjadi anggota BPD Desa Seri Dalam, Kabupaten Ogan Ilir, Palembang.
4. Sesepeuh Desa Seri Dalam atau orang yang paling dihormati di Desa Seri Dalam.
5. Telah menetap di wilayah kabupaten Ogan Ilir sejak 3 tahun sebelum pemekaran daerah terjadi sampai sekarang (+ sejak tahun 2001).
6. Dalam penelitian ini semua informan sebanyak 6 orang yang semuanya merupakan anggota BPD.

1.7.6. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari informan yang merupakan tokoh kunci dari informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari hasil dari pengamatan secara langsung (observasi), wawancara secara mendalam dengan pegawai pemerintahan dan masyarakat kabupaten Ogan Ilir. Dalam hal ini proses pengumpulan data dilakukan dengan bertatap muka dan wawancara langsung dengan informan dengan menggunakan perekam

suara (*recorder*), mencatat proses pemekaran kabupaten Ogan Ilir dan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat kabupaten Ogan Ilir.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau penunjang yang berhubungan atau berkaitan dengan tema penelitian yakni sejarah pemekaran kabupaten Ogan Ilir, data-data monografi kabupaten Ogan Ilir, data penting lainnya yang berkaitan dengan perubahan sosial dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Ogan Ilir. Sumber-sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen, halaman-halaman dalam internet, catatan tertulis, dan keterangan dari sumber pendukung, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lengkap tentang subjek penelitian.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan secara langsung atau observasi

Peneliti datang langsung ke lokasi penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Dengan pengamatan secara langsung peneliti dapat melihat perubahan sosial dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Disini peneliti mencoba melihat tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten Ogan Ilir (OI) dan usaha pemerintah kabupaten OI untuk mencapai tujuan utama pemekaran kabupaten OI. Peneliti disini bersifat non partisipan artinya peneliti hanya menonton dan mengamati dampak positif dan negatif dari otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten OI.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, penelitian sebagai alat utama dalam proses pengumpulan data. Wawancara mendalam dalam hal ini berupa pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti dengan tujuan agar memudahkan peneliti dalam proses penggalian informasi. *Guide interview* memberikan kebebasan informan untuk menyampaikan pendapat, pandangan, pikiran dan perasaan tanpa ada paksaan dari sipeneliti. Dengan teknik wawancara peneliti mencoba bertatap muka langsung dengan pegawai pemerintahan dan masyarakat kabupaten OI, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi tentang dampak otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dengan mempelajari sumber-sumber terkait, seperti buku-buku yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti buku-buku tentang otonomi daerah dan pemekaran wilayah dari beberapa literatur, artikel atau buku lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian sehingga dapat menunjang pelaksanaan penelitian.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode serta mengkategorisasikan data-data yang

diperoleh di lapangan (Mouro P. Rahardjo, 1999:16). Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Pemrosesan Satuan (*Unityzing*)

Dalam pemrosesan satuan (*unityzing*). Ada dua tahap yaitu pertama, tipologi satuan, tahapan ini memberikan nama satuan apa yang di perkirakan oleh subjek, yang dikehendaki oleh latar penelitian, maksudnya peneliti menulis apa yang di perkirakan atau di kemukakan oleh informan dalam bentuk bahasanya dalam bentuk tulisan dengan cara mengartikanya oleh peneliti berdasarkan pengamatanya dilapangan.

Kedua, penyusunan satuan, yang terdiri dari informasi kecil yang mempunyai arti, kemudian disusun untuk memudahkan ketegorisasi. Penprosesan satuan (*Unityzing*) adalah langkah pertama analisis data, yaitu dengan memperoleh tipologi satuan dan penyusunan satuan. Satuan atau unit adalah satuan suatu latar. Pada dasarnya satuan ini merupakan alat untuk menghaluskan pencatatan data.

Jadi pada tahapan ini, peneliti akan mencoba menuliskan data-data berdasarkan pengalaman pribadi. Kemudian, peneliti akan mendatangi lokasi penelitian untuk melihat langsung dampak otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten Ogan Ilir. Hal ini dilakukan, untuk lebih meluaskan wawasan peneliti tentang objek kajian yang akan diteliti. Setiap data baru yang didapatkan dari informan akan dipisahkan dengan menggunakan bantuan penomoran. Pemisahan ini langsung dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan data-data tersebut

dalam bentuk tulisan, karena data-data baru yang diperoleh masih berbentuk bahasa daerah yang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang baku.

2. Membuat kategorisasi data

Data yang diperoleh dari lapangan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam kategori ini, tumpukan data yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, atau kriteria tertentu, kemudian akan dikategorikan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Kategori ini dilakukan dengan cara menyusun data yang diperoleh. Dalam hal ini data berupa jawaban hasil pertanyaan penelitian mengenai dampak otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, kemudian data disusun dan disesuaikan terhadap kriteria dan dikembangkan. Maksud dari penyusunan data adalah berdasarkan hasil jawaban dari rumusan masalah dan dikembangkan dalam pembahasan penelitian. Uraian-uraian singkat yang diperoleh dari data tersebut disajikan kedalam sebuah tulisan cerita dengan menggunakan kerangka pemikiran yang ada dengan cara dianalisis.

3. Penafsiran data (*Interpretasi*)

Data yang telah disusun berdasarkan satuan dan dikategorisasikan dengan terjemahan akan diberi makna dengan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam penafsiran data ini, peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan dan menceritakan tentang penelitian yang sesuai dengan dengan permasalahan. Untuk menganalisis, hasil wawancara akan dilengkapi dengan transkrip untuk memudahkan interpretasi. Walaupun dalam analisis seperti ini ada kecenderungan

sifatnya subjektif, namun tingkat validitasnya secara objektif dapat dipercaya.

Pada tahapan akhir ini, peneliti mulai menuangkan seluruh data yang terkumpul dari pengalaman pribadi dan para informan. Semua data yang telah diberi nomor urut sesuai dengan tingkat validitas (kebenaran) dan dikategorikan akan sangat membantu peneliti dalam menuliskan hasil penelitian. Sehingga, pada tahap akhir ini peneliti dapat dengan mudah menemukan kekurangan data yang harus segera dilengkapi. Peneliti akan menggabungkan data-data hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan pengalaman dengan yang diberikan oleh para informan yang terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustono, Budi, 2005, "Otonomi Daerah dan Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara" dalam *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, editor Jamil Gunawan, Jakarta: LP3ES
- Arikunto, Suharsini. 1997. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rhineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Doni, M. Ade, *Skripsi Evaluasi Proses Pemekaran Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Identifikasi Data Kelengkapan Antara prosedur Dan Realita)*, 2011
- Henderiyana, *Skripsi Faktor-faktor Yang Berpengaruh Pada Pemekaran (Terbentuknya) Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Riau UNRAU*, 2010
- Keesing, Roger M. 1992. *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*, Jilid 1 dan 2 (terj. RG. Soekadijo). Jakarta : Erlangga
- Koentjaraningrat, 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rhineka Cipta
- _____. 1997. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: PT. Dian Rasa
- _____. 1994. *Kebudayaan, Mentalis, dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Malley, Michael, 2001, "Daerah, Sentralisasi dan Perlawanan" dalam Donald K. Emmerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, Jakarta: PT Gramedia
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
- Piliang, Indra dan Dandi Ramdani. 2003. *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa
- Purnama, Dadang. 2007. *Lingkungan Sosial Budaya: Universitas Sriwijaya*. (Modul Mata Kuliah Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tidak Diterbitkan).
- Raharjo, 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.

Riyadi, Dodi Slamet, 2002, *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah

Rustam Uton dan Canon Sarwani. 2006." *Analisa Lqshitf Lqshare untuk Mengukur Dampak Perluasan Kota Terhadap Kinerja Ekonomi Regional.*" *Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 17/ No. 21sat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah

Soekanto, Soerjono. 1998. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Supriyady, Deddy Bratakusuma & Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pusta Utama

Supriyanto. 2006," *Pemekaran Daerah Berdampak pada Penurunan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.*" Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Syamsudin, Ahmad & Marzuki. 2007. *Iklim Investasi Daerah*, Jakarta: GTZ-RED

Tarigan, Robinson, 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 tahun 2004, TLN No. 4437